

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara alamiah koperasi sesungguhnya memiliki berbagai kelebihan dalam bentuk keunggulan komparatif dalam persaingan dibandingkan dengan rancang bangun badan usaha lain di Indonesia. Keunggulan kooperatif koperasi terbangun dari jumlah anggota sebagai pangsa pasar, berbagai fasilitas kredit program dengan biaya rendah yang ditawarkan pemerintah melalui anggaran maupun penyisihan laba BUMN, akses terhadap program pendidikan dan latihan dari berbagai institusi dan lain sebagainya (WiratMaja, 2010).

Karakteristik fungsi sosial yang melekat pada koperasi yang tidak semata-mata mementingkan orientasi keuntungan menempatkannya sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Sebagai rancang bangun badan usaha yang paling sesuai dengan sistem perekonomian pancasila, namun sungguh disayangkan koperasi belum mampu menjadi pemeran utama dalam kancah perekonomian Indonesia. Posisinya masih kalah dibandingkan dengan perusahaan milik perseorangan dan perusahaan milik negara.

Gagasan-gagasan baik yang melekat pada koperasi sebagai rancang bangun badan usaha yang ideal di Indonesia, belum mampu menempatkannya sebagai bangun usaha utama setidaknya disebabkan oleh tiga hal. Sebab pertama adalah lemahnya manajemen dan tata kelola koperasi khususnya dalam hal sistem pengendalian intern. Sebab kedua adalah belum

terbangunnya rasa memiliki dikalangan anggota koperasi sehingga tak jarang anggota malah memilih jasa atau produk yang disediakan oleh lembaga selain koperasi(Wahyudin, agus, dkk, 2014).

Sebab ketiga adalah belum mampunya koperasi mentransformasi keunggulan komperatifnya menjadi keunggulan kompetitif karena lemahnya jiwa kewirausahaan para pengurus, sehingga koperasi yang seharusnya menyediakan barang dan jasa dengan tingkat harga yang lebih rendah tidak jarang malah menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari para pesaingnya (Wahyudin, agus, dkk, 2014).

Lemahnya sistem pengendalian intern dalam manajemen koperasi terbukti telah banyak mengakibatkan koperasi berguguran karena tindak kecurangan dan ketidakberesan yang dilakukan oleh pengelola. Kebangkrutan sebuah koperasi karena tindak kecurangan yang dilakukan oleh pengelola akan berdampak pada ketidakpercayaan anggota koperasi pada suatu kawasan tertentu. Jika ini terjadi usaha mengembalikan kepercayaan masyarakat bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun (WiratMaja, 2010).

Di Indonesia sendiri banyak bermuculan berbagai kasus kecurangan dalam akuntansi. Kasus kejahatan perbankan atau manipulasi pajak. Strategik Indonesia memaparkan bahwa pada kuartal pertama tahun 2011 saja, telah terjadi sembilan kasus pembobolan bank dengan modus kejahatannya bukan hanya kecurangan namun juga karena lemahnya kontrol internal perusahaan terhadap sumber daya manusia (Dwiantika, 2011).

Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I) dalam penilaian kinerja Kementerian Koperasi dan UKM, mengumumkan kuantitas koperasi memang meningkat, akan tetapi banyak terjadi penyimpangan operasional yang ditemui di sejumlah wilayah di Indonesia. Ribuan koperasi yang harus ditindak tegas karena melakukan berbagai pelanggaran serius, salah satunya pelayanan kepada anggota nonkoperasi. Penyimpangan ini juga memungkinkan para pengurus koperasi bisa menggelapkan dana nasabah. Oleh karena itu dibutuhkan serangkaian tindakan strategis untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan atau kecurangan di masa mendatang (WiratMaja, 2010).

Menurut KUHP Pasal 378, perbuatan curang sendiri adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang (Tuanakotta, 2016).

The Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE) dalam Badzlina (2014) : “Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (manipulasi atau memberikan laporan keliru terhadap pihak lain) dilakukan orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain.” Maka dari itu perlunya prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan

keuangan, prinsip-prinsip pengelolaan keuangan ialah transparansi, akuntabilitas dan value for money (Mardiasmo, 2011:105).

Sama halnya pada prinsip pengelolalan keuangan perusahaan, perusahaan juga haruslah menjalankan pengelolaan keuangan dengan menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi (Mahlel, dkk, 2016). Dan Adanya penurunan atau peningkatan akuntabilitas suatu organisasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya karena terjadinya kecurangan akuntansi di dalam suatu organisasi (Thoyibatun, 2012)

Makna transparansi disini ialah keterbukaan informasi yang menyeluruh kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahlel dkk, 2016), dan Mckinsey dan Howard menyatakan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu posisi dimana individu yang memiliki dan mempergunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan, dan memang pada kenyataannya terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku pada institusi yang bersangkutan (Akdon, 2011: 208). Dan pada praktiknya Akuntabilitas dapat diwujudkan dalam bentuk pengelolaan keuangan yang transparan itu sendiri (Mahlel dkk, 2016).

Jadi dapat ditarik sebuah Korelasi yang gamblang bahwa transparansi pun merupakan unsur dari Akuntabilitas, dengan kata lain adalah transparansi merupakan bentuk tanggungjawab seseorang kepada pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang membutuhkan informasi

akuntansi guna pengambilan keputusan ekonomi yang tepat. Berbagai bukti empiris yang telah didapatkan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi dibedakan menjadi faktor perusahaan (eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai pelaku kecurangan itu sendiri (Gusti Ayu, 2016). Faktor eksternal dapat berupa sistem pengendalian internal perusahaan. Tindakan kecurangan dapat juga dipengaruhi adanya sistem pengendalian internal perusahaan dan pengawasan yang lemah oleh atasan, dan faktor internal dapat berupa tingkat tanggung jawab yang dimiliki individu dalam organisasi (Vani, adelin, 2009).

Pengurus (manajemen puncak) koperasi sangat berkepentingan memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan oleh para manajer dan para personel (karyawan) berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu, pengurus sangat perlu melakukan pengawasan atau pengendalian atas aktivitas bawahannya. Pengendalian sangat penting agar kesalahan dan penyimpangan yang terjadi tidak berlangsung lama, segera dapat diatasi, agar tujuan tetap dapat dicapai.

Karena itu pula, fungsi pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen, yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi manajemen yang lain (perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan). Luasnya kegiatan usaha koperasi mengakibatkan pengurus (manajemen puncak) tidak dapat mengawasi atau mengendalikan secara langsung seluruh kegiatan atau aktivitas koperasi. Untuk itu, pengurus harus mendesain dan membangun

suatu sistem pengendalian yang memadai. Salah satu pengendalian yang perlu dibangun adalah pengendalian intern.

The Committee Of Sponsoring Organization Of Freedway Commettee (COSO), (COSO, 2013) yang beranggotakan AICPA dan FEI menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan proses yang mempengaruhi manajemen dalam memberikan pemikiran yang memadai untuk mencapai tujuan perusahaan melalui : Pencapaian efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan, (b) Keandalan dala laporan keuangan, (c) Mentaati hukum dan peraturan. Sistem pengendalian internal menyediakan mekanisme guna mendeteksi keterjadian suatu fraud, baik saat fraud itu terjadi, akan terjadi, maupun sebelum terjadi.

Bastian (2015) menjelaskan bahwa pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan, sistem pengendalian internal ini meliputi struktur organisasi, metode yang digunakan, dan standart-standart yang ditentukan terutama guna menjaga kekayaan entitas serta mengecek ketelitian dan keandalan data dan informasi akuntansi. Artinya, informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, bisa menjadi alat untuk pendeteksi kecurangan.

Pengendalian intern juga berkaitan dengan upaya meningkatkan keandalan informasi akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan, dan kepatuhan para manajer dan personel terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas. Peningkatan keandalan informasi akuntansi yang tersaji dalam laporan keuangan sangat

penting artinya bagi pengurus, karena semua aktivitas operasi koperasi akan berdampak pada keuangan, dan karena itu akan tercermin dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan mempunyai dua fungsi pokok. Pertama sebagai media pertanggungjawaban pengurus kepada anggota dan kreditur, yang menanamkan atau menginvestasikan modalnya di koperasi. Kedua, laporan keuangan merupakan informasi penting bagi pengurus dalam perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial. Bilamana informasi akuntansi dalam laporan keuangan tidak handal, dapat dipastikan bahwa penilaian kinerja pengurus oleh anggota dan kreditur juga tidak akan handal, dan keputusan manajerial yang didasarkan atas laporan keuangan juga menjadi tidak handal. Oleh karena itu, adalah sangat penting bagi pengurus untuk mendesain dan membangun pengendalian intern yang memadai, serta mengimplementasikannya dengan baik dan sungguh-sungguh

Lemahnya sistem pengendalian internal pun menjadi faktor terbukanya celah, sehingga dapat menjadi perangsang munculnya berbagai kecurangan dalam sebuah organisasi bisnis. Untuk menangani masalah kecurangan akuntansi tersebut, maka diperlukan pengawasan. Jadi untuk mencapai sebuah pengawasan yang baik, maka dibutuhkanlah sebuah sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien. Pengendalian intern sangat berguna dalam melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan, pemborosan dan juga pencurian yang dapat dilakukan baik oleh pihak di dalam perusahaan maupun pihak di luar. Pengendalian internal yang

baik memungkinkan manajemen siap untuk menghadapi perubahan ekonomi yang cepat, persaingan, pergeseran permintaan pelanggan serta restrukturisasi guna kemajuan entitas yang akan datang (Ruslan, 2009).

Komponen dari Sistem Pengendalian Internal menurut COSO yang dikutip oleh Marshall dan Steinbart (2013:23), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern terdiri dari lima komponen, yaitu berupa Lingkungan pengendalian (control environment), Penilaian resiko (risk assestment), Aktivitas pengendalian (control activities), Informasi dan Komunikasi (information and communication), Pengawasan (monitoring).

Adapun unsur-unsur dari Sistem Pengendalian Internal yang dikemukakan oleh Mulyadi (2013:164), ada empat unsur pokok yang harus dimiliki untuk dapat membentuk pengendalian yang baik, yaitu: Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas, Sistem kewewenangan dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, Praktik yang sehat dalam melakukan tugas dan fungsi disetiap divisi entitas, Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Kesesuaian dalam sistem pengendalian intern, berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dalam organisasi, Penelitian Thoyibatun (2009), Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan adanya pengendalian internal, maka pengecekan akan terintegrasi

secara otomatis terhadap pekerjaan individu dengan individu lain dalam satu organisasi.

Pengendalian intern yang baik dan disertai praktek-praktek yang sehat dalam tata kelola keuangan akan menjaga kekayaan perusahaan secara preventif, detektif dan korektif. Penerapan sistem pengendalian intern dalam kerangka pengelolaan koperasi sesungguhnya dapat dilakukan dengan mudah melalui penerapan sistem dan prosedur serta pemisahan wewenang dan tanggung jawab serta menempatkan kelembagaan pengawas, pengurus, pengelola dan karyawan pada porsi wewenang dan tanggungjawabnya masing-masing (WiratMaja, 2010)

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengambil objek dikawasan jombang, yaitu sebuah koperasi dibawah naungan departemen agama jombang yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia “BAHAGIA” Kantor Kementrian Agama Kabupaten Jombang. Koperasi Pegawai Republik Indonesia “BAHAGIA” selanjutnya disebut dengan KPRI Bahagia, KPRI Bahagia bergerak di empat bidang usaha, yaitu : Pertama, Unit pertokoan, unit pertokoan tersebut berdiri tanggal 30 Oktober 2013 bekerjasama dengan B-Mart Swalayan untuk membuat toko modern dengan nama Bahagia Mart guna memenuhi kebutuhan anggota, Kedua, Unit Simpan Pinjam, ketiga, Unit Bus Pariwisata, ke empat, Unit Foto calon Jamaah Haji.

Sejauh ini anggota KPRI-Bahagia tahun 2019 Sejumlah 1.375 orang. Karyawan dari KPRI Bahagia sendiri terdapat 10 orang diunit simpan pinjam, 1 orang diunit difoto calon jamaah haji, dan 4 orang diunit toko swalayan.

Core Bisnis koperasi ini adalah unit simpan pinjam, dalam hal ini yang beragam adalah jenis pinjaman yang disediakan KPRI Bahagia, yaitu : Reguler, Extra, Haji, dan pinjaman USP. Simpan pinjam di kpri Bahagia diperuntukkan hanya untuk pegawai yang berada dalam naungan Kementrian Agama seperti Pegawai Kemenag, Madrasah Tsanawiyah (MTS) dan Madrasah Aliyah (MA) se-kabupaten Jombang

Jadi dalam penelitian ini peneliti akan mengulas dan memfokuskan penelitianpada Analisis sistem pengendalian internal yang sudah diterapkan oleh KPRI Bahagia, apakah sudah efektif dan efisien, dan apakah sudah sesuai dengan prosedur yang dibuat sehingga dapat menunjang akuntabilitas dalam meminimalisir kecurangan. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan di KPRI- Bahagia Departemen Agama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Sistem Pengendalian Internal Menunjang Akuntabilitas Dalam Meminimalisir Kecurangan Pada KPRI-Bahagia.

1.3 Tujuan penelitian

Menganalisa Penerapan Sistem Pengendalian Internal Dalam Menunjang Akuntabilitas Dalam Meminimalisir Kecuranganpada KPRI-Bahagia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat teoritis

- a. Pada penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat untuk menambah wawasan dibidang ilmu akuntansi keuangan dan audit.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa (umumnya) dan para akuntan (khususnya) mengenai prospek dari profesi Fraud examiner ini yang kian diperlukan guna meminimalisir kecurangan akuntansi dan tak terkecuali untuk menambah wawasan bagi pengembangan keilmuan serta diharapkan menjadi acuan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktisi

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil oleh pihak KPRI Bahagia, serta memberikan pengetahuan dan wawasan kepada seluruh karyawan KPRI-Bahagia, terkhusus pada karyawan KPRI Bahagia dalam pengambilan kebijakan untuk menekan adanya kecenderungan kecurangan akuntansi dimasa yang akan datang.

- b. Memberi informasi kepada masyarakat bahwa fenomena kecurangan sedang marak terjadi di lingkungan bisnis dan mengenai tahapan dan cara dalam mendeteksi dan mencegahnya sedini mungkin.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat terkait eksistensi dari Fraud examiner yang bermanfaat dalam memperkecil ruang lingkup Kecurangan.